

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab. Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Telp. (0265)544200 Fax. (0265)546059

Tasikmalaya - Jawa Barat

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang - undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 30 Juni 2021

Klusa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ZAINI RAHMAN

NIP.197703012002121006

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	i
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Ringkasan	i
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	10
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	17
B.2. Belanja.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	21
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.8. Ekuitas	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	25
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	25
D.2. Beban Pegawai	25
D.3. Beban Persediaan	25
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	26
D.5. Beban Pemeliharaan	27
D.6. Beban Perjalanan Dinas	27

D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	28
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	29
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	29
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	30
D.11.	Beban Lain-lain.....	31
D.12.	Kegiatan Non Operasional	31
D.13.	Pos Luar Biasa	32
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	32
E.1.	Ekuitas Awal	32
E.2.	Surplus (defisit) LO	32
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	33
E.4.	Koreksi Aset Tetap	33
E.5.	Koreksi atas Beban.....	34
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	34
E.7.	Ekuitas Akhir.....	34
E.	Pengungkapan Penting Lainnya	35
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	35
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	35
F.	Rincian nilai perolehan, Akumulasi nilai penyusutan dan Nilai buku aset tetap Pengadilan Agama Tasikmalaya.....	35

Pengadilan Agama Tasikmalaya

Jl. By Pass Lingasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

Tasikmalaya - Jawa Barat

Telp. (0265) 544200 Fax. (0265) 546059

e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



ZAINI RAHMAN

NIP. 197703012002121006

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 30 Juni 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 287.614.000 atau mencapai 106,94 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 268.948.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 26.300.000 atau mencapai 37,54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 70.062.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan TA 2021 .

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 18.500.000, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 18.500.000; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 18.500.000 dan Rp. 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan -LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan -LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 287.614.000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 26.300.000 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 193.073.585. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus

(defisit) sebesar Rp. 0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp. 193.073.585.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 193.073.585, kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp. 193.073.585) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021 DAN TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021			TA 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	268.948.000	287.614.000	106.94	262.791.50
JUMLAH PENDAPATAN		268.948.000	287.614.000	106.94	262.791.500
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	0
Belanja Barang	B.4	70.062.000	26.300.000	37.54	21.000.000
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		70.062.000	26.300.000	37.54	21.000.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NERACA
PER 30 Juni 2021 DAN TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Juni 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	18.500.000	18.500.000
Persediaan	C.2.	558.415	0
Jumlah Aset Lancar		17.941.585	18.500.000
Aset Tetap			
Tanah	C.3.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
JUMLAH ASET		17.941.585	18.500.000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.8.	18.500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.500.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		18.500.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.9.	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.941.585	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2021 DAN TA 20120
(dalam satuan Rupiah)

RAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	287.614.000	262.791.500
Jumlah Pendapatan		287.614.000	262.791.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	558.415	21.917.522
Beban Barang dan Jasa	D. 4	51.022.000	48.883.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	42.960.000	55.140.000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		94.540.415	21.000.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		193.073.585	158.768.500
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Pendapatan PNBPN		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		193.073.585	158.768.500

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2021 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	193.073.585	158.768.500
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain		0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(193.073.585)	(158.768.500)
Ekuitas Akhir	E. 7	558.415	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tasikmalaya

Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2014 - 2021 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja.

Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tahun 2014 sampai dengan 2021 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Visi Mahkamah Agung adalah *"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"*, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah *" Terwujudnya Badan Peradilan Yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat "*

Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah Misi Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah:

1. Menjaga Kemandirian sebagai Lembaga Peradilan;
2. Memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kredibilitas dan tranparansi peradilan;
4. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar serta modern;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan tupoksi;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Tasikmalaya melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2020 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain - lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2020 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2021 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2020.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :Rp.
262.791.500*

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 287.614.000 atau mencapai 106.94 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 268.948.000. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	126.760.000	91.240.000	71,97
2.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17.994.000	24.980.000	138.82
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	124.194.000	171.394.000	138.00
5.	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		268.948.000	287.614.000	106.94

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 287.614.000 atau 106.94 persen dibandingkan TA 2021.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2021 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2021	TA 2021	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	91.240.000	77.710.000	13.530.000	20,57
2.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	24.980.000	27.650.000	27.108.000	167,74
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	171.394.000	157.431.500	139.625.500	136,50
5.	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan		287.614.000	262.791.500	225.412.739	83,81

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp.
26.300.00
0

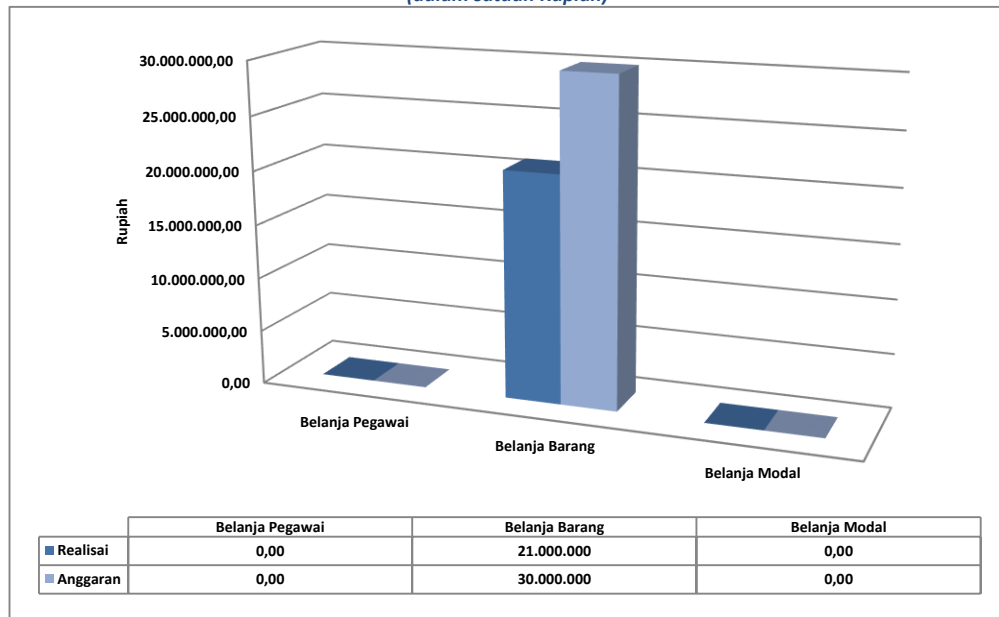
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Tasikmalaya per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 26.300.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 37,54 % dari anggaran senilai Rp. 70.062.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Juni 30 Juni 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	70.062.000	26.300.000	37,25
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	70.062.000	26.300.000	37,25
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	70.062.000	26.300.000	37,25

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.300.000 atau sebesar 25,23 % dari realisasi tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan karena pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 mengalami penambahan dibandingkan dengan pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021. Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2021 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	26.300.000	21.000.000	5.300.000	25,23
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	26.300.000	21.000.000	5.300.000	25,23

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2021 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Juni TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.4. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
26.300.00
0

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tasikmalaya per 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 26.300.000 dan Rp. 21.000.000. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.300.000 atau sebesar 25,23 % dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kenaikan pagu DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
2. Adanya Kenaikan Pagu berupa Belanja Barang

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	17.720.000	38.958.000	(21.238.000)	(44,89)
Belanja Jasa	19.928.000	49.920.000	(21.428.000)	(42,92)
Belanja Perjalanan Dinas	55.140.000	119.150.000	(23.465.000)	(19,69)
Total Belanja Brutto	21.000.000	117.957.000	(96.957.000)	(11,70)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	21.000.000	117.957.000	(96.957.000)	(11,70)

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp.
0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tasikmalaya per 31 Juni TA 2021 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah

:

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 31 Juni TA 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Gedung dan Bnagunan	0	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Total Aset Lancar	0	0

Persediaan :

Rp. 0

C.2. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan pengakuan atas Buku Register Perkara pada TA 2021.

Rincian Persediaan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 11 Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021
Persediaan	0	0
Total Persediaan	0	0

C.3. Tanah

Tanah: Rp. 0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0
						0

C.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan:
Rp..0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp.0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Tabel 13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.364.076.014	2.802.317.947	561.758.067
2	Gedung dan Bangunan	6.358.232.000	437.466.174	5.920.765.826
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	383.842.432	383.842.432	0
	Jumlah	10.106.150.446	3.623.626.553	6.482.523.893

C.8. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp.0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2021
Uang Muka dari KPPN	18.500.000	0
Jumlah	18.500.000	0

C.9. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp. 0*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
287.614.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah sebesar Rp. 287.614.000 dan Rp. 262.791.500. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2021	%
1.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	91.240.000	77.710.000	71.97
3.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
4.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	24.980.000	27.650.000	138.82
5.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	171.394.000	157.431.500	138.00
6.	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		262.791.500	262.791.500	106.94

D.2. Beban Pegawai

Tidak terdapat anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama Tasikmalaya.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.0*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 558.415,- dan Rp. 21.917.522,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Beban Persediaan per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	558.415	21.917.522		64,23
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	558.415	21.917.522	8.572.571	64,23

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp.48.883.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.883.000 dan Rp. 88.878.000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Beban Jasa per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.720.000	38.958.000	19.605.000	50,32
Beban Jasa Konsultan	19.928.000	49.920.000	78.000	0,15
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	48.883.000	88.878.000	19.683.000	22,14

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.55.140.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 55.140.000,- dan Rp. 119.150.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	55.140.000	119.150.000	4.675.000	3,92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	55.140.000	119.150.000	4.675.000	3,92

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.802.317.947	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	437.466.174	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	383.842.432	0	0	0

Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.623.626.553	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 23 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 24 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0
Lancar				
Penjualan Alat Angkut	0	0	0	0
Darat				

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Juni TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 0

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 12.883.990,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. 158.768.500

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 158.768.500 dan Rp. 48.036.271. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp.0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 26 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp.0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban : Rp.0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 27 Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 28 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Revisi Administrasi karena terjadi Mutasi dan Promosi Pejabat di Lingkungan Pengadilan Agama Tasikmalaya.

Semula :
Nama : Drs. Sukar Sigit Handoyo
Nip : 196402231994031002

Menjadi :
Nama : Zaini Rahman
NIP : 197703012002121006

Pengadilan Agama Tasikmalaya
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

Tabel 11 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Juni 2021 No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan
005
04
0200
690023

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}